

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1.1 Kajian Teori

1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Sukirno, 2016) mengatakan “Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan

faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.

Tingkat ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang dicapai oleh suatu Negara atau Wilayah dihitung dari pendapatan nasional riil, yaitu Produk Nasional Bruto riil (PNB) atau Produk Domestik Bruto riil. Perhitungan pendapatan nasional secara ini memungkinkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara langsung dihitung dari pendapatan riil yang tersedia. Formula yang akan digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu :

Dimana :

g : Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen

PNR : Pendapatan nasional riil berdasarkan harga konstan

PNR_t : Pendapatan nasional riil untuk tahun dimana tingkat pertumbuhan ekonominya dihitung

PNR_{t-1} : Pendapatan nasional tahun sebelumnya

Di Indonesia pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) riil untuk tingkat nasional, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil untuk tingkat daerah.

2.1.1.1 Ciri Ciri Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat beberapa hal yang bias dikatakan bagi sebuah perekonomian mengalami pertumbuhan, ke enam ciri yang dikemukakan oleh :

1. Penduduk mengalami pertumbuhan yang relative cepat dibarengi dengan angka pendapatan perkapita yang relative tinggi.
2. Produktivitas mengalami peningkatan dengan indikator peningkatan perkapita.

3. Perubahan struktural ekonomi yang signifikan dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.
4. Urbanisasi masyarakat mengalami peningkatan.
5. Negara lain mudah melakukan ekspansi bisnis ke negara tersebut.
6. Arus barang dan faktor produksi lainnya mengalami peningkatan.

2.1.1.2 Proses Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses bertumbuhnya sebuah perekonomian, diantaranya adalah dari faktor ekonomi itu sendiri dan faktor dari luar aspek ekonomi. Disamping itu, sudah pasti sebuah pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kualitas sumber daya yang ada pada suatu negara seperti alam, manusia, usaha, teknologi, modal dan lainnya.

1. Faktor Ekonomi

Faktor produksi dianggap sebagai elemen penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini :

a. Sumber Alam

Alam merupakan kekayaan yang hadir secara naluriah yang dimiliki oleh sebuah negara. Sehingga sumber daya alam dapat menjadi penopang bagi sebuah negara dalam mengupayakan perbaikan kondisi perekonomiannya.

b. Akumulasi Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang menjadi penyebab keberlangsungan sebuah kegiatan ekonomi. Pembentukan modal memerlukan pengorbanan dengan mengurangi konsumsi yang bisa jadi dapat berlangsung lama.

c. Organisasi

Ibarat anggota tubuh yang saling membutuhkan wadah untuk berjalan sesuai fungsinya, organisasi merupakan elemen terpenting dalam menopang keberlangsungan

ekonomi. Tanpa sebuah organisasi atau yang kerap disebut dengan perusahaan, maka sebuah kegiatan perekonomian akan terhambat produktivitasnya dan kehilangan wadah untuk memproduksi.

d. Kemajuan Teknologi

Teknologi dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan segala aspek ekonomi, perkembangan teknologi tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memudahkan proses produksi sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

e. Pembagian Kerja Dan Skala Produksi

Setiap individu memiliki skill dan kompetensi yang tidak serupa, sehingga tidak mungkin segala bentuk pekerjaan yang berbeda-beda pula disamaratakan dapat dikelola oleh setiap individu.

Untuk mengurangi ketidakefisienan proses dan hasil kerja, maka diperlukan spesialisasi kerja bagi masing masing karyawan.

2. Faktor Non-Ekonomi

Tidak hanya dari faktor ekonomi, beberapa hal yang tidak termasuk ke dalam aspek ekonomi namun juga mampu mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Faktor sosial

Sosial dan budaya dapat menjadi faktor pendukung sebuah perekonomian. Hal tersebut dikarenakan sosial dan budaya akan membentuk pandangan, struktural sosial, serta harapan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau masyarakat.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor-faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi.

c. Faktor politik dan Administratif

Kondisi politik dan administratif sebuah negara menjadi penentu penghambat atau tidaknya proses pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Klasik

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Adam Smith

Adam Smith merupakan tokoh klasik yang sering membahas soal teori ekonomi salah satunya termasuk pertumbuhan ekonomi. Pada buku yang di tulis olehnya *An Inquiry into the Nature and Causes Wealth of Nation* (1776), Adam Smith menjelaskan pendapat mengenai bagaimana melakukan analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan dua faktor, yakni faktoraktor tersebut ialah faktor pertumbuhan penduduk dan output total.

Dilakukannya dengan tiga variabel yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal cadangan atau capital untuk Perhitungan total output. Adapun faktor kedua yaitu pertumbuhan penduduk digunakan untuk menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut David Richardo

Teori David Ricardo mengenai ekonomi yang paling familiar adalah tentang *the law of diminishing return*. Pandangan mengenai kenaikan jumlah penduduk yang mampu mengubah penurunan margin produk karena keterbatasan luas tanah.

Berdasarkan pandannannya, menaikkan produktivitas perlu peningkatan teknologi dan jumlah modal yang besar, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

1. Teori Neo Klasik

Dalam Teori ini, dua tokoh yang paling populer adalah Joseph A. Schumpeter dan Robert Solow.

a. Pertumbuhan Ekonomi menurut Joseph A. Schumpeter

Pandangan dari Joseph A. Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *The Theory of Economic Development*, mengacu pada pengusaha berperan dalam hal pembangunan. Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dikarenakan ide-ide baru dari para pebisnis.

- b. Pertumbuhan Ekonomi menurut Robert Solow. Robert Solow menjelaskan pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh empat faktor yaitu, yakni manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

2. Teori Neo Keynes Dalam Teori Neo Keynes

Pada teori Neo Keynes dikenal tokoh Roy F. Harrod dan Evsey D Domar. mereka berpendapat bahwa korelasi investasi kepada permintaan agregat pertumbuhan maksimum dari produksi. Karna yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi ialah investasi. Teori Neo Keynes ini berpandangan investasi tanan modal ialah komponen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi.

3. Teori W. W. Rostow

Pembahasan tentang hal ini. Berbagai pemikirannya gertulis di bukunya yang berjudul *The Stages of Economic, A Non Communist Manifesto*. Dalam buku tersebut, Rostowmemakai sejarah dalam mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di masyarakat.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Menurut (Warsito, 2011) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah. (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut (Rahman, 2015) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran-pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan bukan pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah (Bastian, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan dan mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Halim, 2002).

Sebagaimana halnya dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Pemerintah Daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pengolahan kekayaan daerah otonom. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 285 tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam pasal 22 PP No.58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dalam pasal 21 huruf a terdiri atas :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selanjutnya jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Pajak daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang- Undang No 28 Tahun 2009 daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dalam menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah :

- a. Bersifat pajak bukan retribusi

- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
- c. Objek dan dasar penggunaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/ atau objek pajak
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Contoh retribusi jasa umum adalah pelayanan kesehatan , pengujian kendaraan bermotor dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaiankekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain. Contoh retribusi perijinan tertentu antara lain mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain lain.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan, pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pajak daerah merupakan komponen yang paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pengertian APBD

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2005, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana anggaran tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangantahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Abdul Halim, 2008). Penyenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi unsur-unsur APBD menurut Halim adalah sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta umumnya secara rinci
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

2. Struktur APBD

Dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk dalam struktur APBD. Sebelum undang-undang otonomi daerah dikeluarkan, struktur APBD yang berlaku selama ini adalah anggaran yang seimbang dimana jumlah penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan dan pendapatan masing-masing daerah.

Adapun struktur APBD berdasarkan permendagri No.13 Tahun 2006 “Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari : 1. Pendapatan Daerah, 2. Belanja Daerah, 3. Pembiayaan Daerah”.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah equitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN

- c. Bagian laba atas penyertaan modal dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang dirincimenurut objek pendapatan yang mencakup :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa Giro
- 3) Pendapatan Bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil diskusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengendalian
- 12) Fasilitas sosial dan umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, dan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan perbulan

2.1.3 Jumlah Penduduk

2.1.3.1 Teori Jumlah Penduduk

Istilah penduduk disebutkan kepada individu atau seluruh orang yang telah menetap dan memiliki domisili pada suatu wilayah yang terdaftar secara geografis di Indonesia dalam kurun waktu sekitar sama dengan atau lebih dari 6 bulan (Herlambang, Sugiarto, & Baskara Said Kelana, 2001). Definisi lain mengenai penduduk ialah mereka yang telah secara resmi bertempat atau menetap pada suatu wilayah. Kendati demikian, konteks pembangunan terdapat dua pandangan mengenai penduduk. Ada yang berpandangan bahwa penduduk merupakan elemen pendukung pembangunan, namun ada pula yang berpandangan sebaliknya (Todaro, 2000).

Kualitas kependudukan adalah keadaan kependudukan yang dinilai dari aspek materil dan nonmateril meliputi tingkat produktivitas, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, tenaga kerja dengan kemandirian kerja alat standar dasar untuk pengembangan kapasitas manusia yang bertakwa berbudaya dan berbangsa dan hidup dengan cara yang berada yang layak untuk negara (M.L Jhingan, 2013).

Pandangan yang menyatakan bahwa penduduk yang terus mengalami pertumbuhan sebagai sebuah hambatan bagi pembangunan, ialah apabila pertumbuhan penduduk tersebut tidak dibarengi dengan tingkat kualitas manusianya. Artinya, penduduk dalam suatu negara banyak namun tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Setiap tahun manusia baru lahir meningkatkan populasi dunia saat ini menjadi miliaran orang. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat menimbulkan banyak masalah bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Apabila upaya-upaya pembangunan yang telah dilakukan di masa mendatang dapat benar-benar berhasil maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk meningkatkan tingkat pendapatan secara umum kesehatan pendidikan dan kesejahteraan serta meningkatkan diri percaya sendiri.

1.1.3.2 Pertumbuhan Penduduk

Aspek-aspek yang dapat menentukan angka pertumbuhan penduduk adalah tingginya angka kelahiran, migrasi masuk (imigrasi) dari negara luar, rendahnya angka kematian, serta migrasi keluar (Ida Bagoes, 2009).

Sementara itu, BPS menyatakan bahwa perhitungan pertumbuhan penduduk dapat diformulasikan seperti berikut :

r : Tingkat laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah penduduk pada akhir periode

P_o : Jumlah penduduk awal periode

n : Jumlah tahun dalam periode tersebut

Dalam sebuah negara yang mengalami pertumbuhan penduduk dari segi kuantitas dapat terjadi jika angka bayi yang lahir tinggi sementara angka kematian orang tua rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya jumlah penduduk dari luar negeri yang melakukan imigrasi ke dalam negeri sementara yang bermigrasi keluar sedikit.

1.1.3.3 Persamaan Berimbang (The Balance Equation)

Dalam perhitungan mengenai pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, yakni dapat diformulasikan seperti berikut ini :

Dimana :

“Pt : Banyaknya penduduk pada tahun akhir

Po : Banyaknya penduduk pada tahun awal

B : Banyaknya Kelahiran

D : Banyaknya kematian

IM : Banyaknya migrasi masuk

OM : Banyaknya migrasi keluar

(B-D): Pertumbuhan penduduk alamiah”

1.1.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk

Ada beberapa pertumbuhan penduduk menurut (M.L Jhingan, 2013)

1. Penduduk Dana Pendapatan Perkapita

Hubungan antara banyaknya jumlah penduduk dengan angka pendapatan perkapita biasanya bertolak belakang. Hal tersebut karena banyaknya penduduk belum didukung oleh pendapatan perkapita yang memadai.

2. Penduduk Dan Standar Kehidupan

Pendapatan perkapita dapat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat standar kehidupan sebuah negara. Sehingga segala sesuatu yang dapat

mendorong pendapatan perkapita akan berkaitan pula dengan perumbuhan ekonomi.

3. Penduduk Dan Pembangunan Pertanian

Perekonomian negara berkembang bertumpu pada sektor pertanian. Sehingga masih banyak sekali pedesaan pada negara-negara yang masih berkembang dan warga-warganya dominan sebagai petani. Sehingga ketika penduduk semakin bertambah, maka lahan akan semakin banyak digunakan sebagai pemukiman. Dengan demikian lahan petani yang digunakan sebagai sumber penghasilan berpotensi menyusut seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

4. Penduduk Dan Lapangan Kerja

Pertambahan jumlah penduduk berarti akan menimbulkan fenomena meningkatnya jumlah permintaan lapangan kerja. Namun, biasanya lapangan pekerja tidak bertumbuh secepat pertambahan penduduk. Sehingga pertambahan penduduk, akan menyebabkan degradasi ekonomi sebab meningkatnya jumlah pengangguran. Dikarenakan ketiadaan sumber pelengkap, tidaklah mungkin untuk mengembangkan lapangan pekerjaan. Akibatnya tenaga buruh pengangguran dan kekurangan lapangan pekerjaan akan meningkat. Penduduk yang meningkat dengan cepat akan mengurangi pendapatan, tabungan dan investasi, karenanya pembentukan modal menjadi semakin lambat dan kesempatan kerja berkurang maka dengan begitu akan menimbulkan pengangguran.

1.1.4 Tenaga Kerja

2.1.4.1 Teori Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja adalah penduduk yang berada di usia kerja, dalam keadaan bekerja atau aktif mencari kerja, serta masih mau dan mampu bekerja. Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, seorang tenaga kerja memiliki kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa, dalam usaha memenuhi kebutuhan pribadi atau pun masyarakat.

Menurut (Mulyadi, 2003), tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Penduduk usia kerja sesuai yang disarankan oleh *International Labour Organization (ILO)* adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang dikelompokkan kedalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Menurut (Simanjutak, 2001) Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja (*Labor Force*) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja, golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan	Perbedaan dan Persamaan	Hasil
1	Indrian Safitri & Aliasuddin (2016) “Pengaruh Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”	Untuk menganalisis pengaruh penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.	Perbedaan : Data diambil dari tahun 2007-2014 Persamaan : Metode penelitian menggunakan regresi data panel.	Angka lamanya bersekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Angka Partisipasi Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

2	Farathika Putri Utami (2020) “ Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh”	Untuk mengetahui hubungan indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan dan pengangguran terhadap perekonomian di provinsi Aceh	Persamaan : Terdapat variable indeks pembangunan manusia (IPM) Perbedaan : Lokasi Penelitian di Provinsi Aceh, Terdapat variabel kemiskinan dan pengangguran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Lora Ekana Nainggolan ¹ , Lenny Dermawan Seimbring ² , Nana Triapnita Nainggolan ³ (2021)	Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan	Persamaan : Terdapat Variabel Pertumbuhan	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap

	“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Berdampak Pada Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara”	ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dan dimediasi oleh indeks pembangunan manusia	ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Perbedaan : Terdapat variabel kemiskinan	indeks pembangunan manusia dan kemiskina Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan
4	Sherina Arum Pamukti ¹ , Andy Dwi Bayu Bawono ² (2022) “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”.	Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin dan Daerah Terhadap Pertumbuhan ekonomi	Persamaan : Terdapat variable pertumbuhan ekonomi Perbedaan : Terdapat Variabel Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

5	Nanda Fitri Yenny ¹ , Khairil Anwar ² (2020) “Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lhokseumawe”	Untuk melihat pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Lhokseumawe	Persamaan : Objek Penelitiannya di Kota Lhokseumawe Perbedaan : Terdapat variabel jumlah penduduk	Pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
---	---	---	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

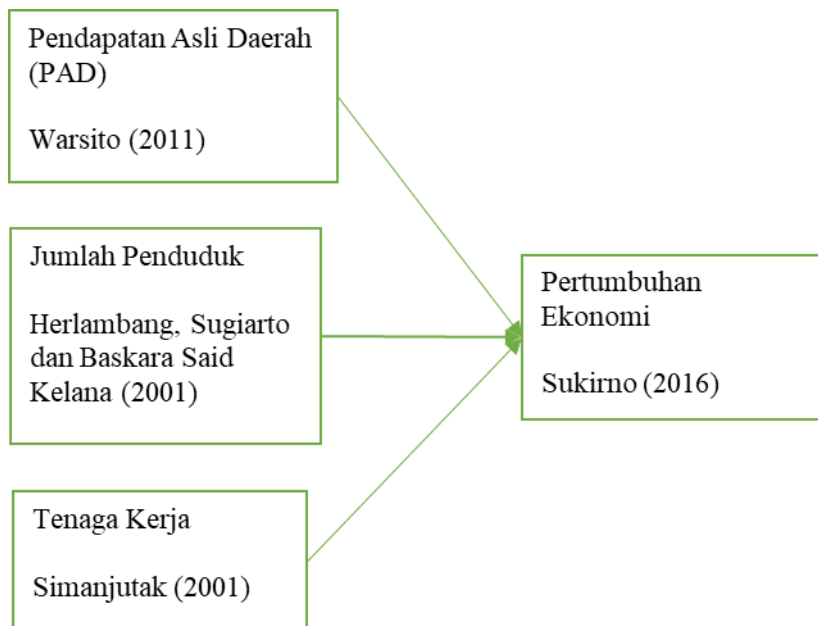
Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi atas pendapatan perkapita tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki hubungan yang positif. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan PAD akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi baik daripada pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor industri dan perdagangan, sektor jasa dan sektor-sektor lainnya.

Sedangkan Jumlah Penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi yang terjadi, maka tingkat ekonominya akan bertambah.

Tenaga Kerja mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini jika tenaga kerja bertambah maka pertumbuhan ekonomi semakin bertambah dan menimbulkan pengangguran.

Berdasarkan penjelasan diatas dan untuk memudahkan apa yang telah dijelaskan alur pemikiran pada penelitian ini, maka dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :



Sumber : Diolah Oleh Penulis

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang bersifat sementara atas masalah penelitian yang sudah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2010).

Sehingga jika disederhanakan definisi hipotesis merupakan sebuah dugaan yang belum pasti, yang dirumuskan berdasarkan pada fakta empiris penelitian terdahulu. Hipotesis biasanya bentuk dari dugaan diolah atau diterima hasil penelitian, positif atau negatif pengaruhnya, serta signifikan atau tidak signifikan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Sehingga hipotesis yang dapat disusun dalam penelitian ini ialah adanya hubungan yang signifikan antara variabel yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum, jumlah tenaga kerja, dan penyerapan tenaga kerja dalam sektor industri. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel tersebut maka dapat dilihat seperti berikut ini:

1. Diduga variabel “pendapatan asli daerah positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota Provinsi di Jawa Barat tahun 2015-2021.”
2. Diduga variabel “jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota Provinsi di Jawa Barat tahun 2015-2021”
3. Diduga variabel “tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota Provinsi di Jawa Barat tahun 2015-2021.”

